

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH  
TAHUN 2024**



**Jl. Urip sumoharjo no. 65 yogyakarta  
TELEPON: 0274-888802**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH
Alamat	Jl. Urip sumoharjo no. 65 yogyakarta
Nomor Telepon	0274-888802

### Penjelasan Umum:

BPR Natasha Bintang Anugrah menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR : Menjadikan BPR terdepan dan terpercaya di DIY
2. Mendukung misi BPR : Berperan aktif dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Memberikan pelayanan terbaik, berkomitmen dan terpercaya, Meningkatkan pertumbuhan perekonomian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR

Dalam menjalankan operasional perbankan BPR Natasha Bintang Anugrah senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking practices). Hal ini sudah menjadi kebutuhan BPR Natasha Bintang Anugrah dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.12/SOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Dengan penerapan Tata Kelola yang Baik, BPR Natasha Bintang Anugrah secara konsisten dan berkesinambungan didukung oleh integritas dan komitmen tinggi yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam pelaksanaan penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Natasha Bintang Anugrah.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>3. Cukup Baik</b>
--	----------------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Bagus Setya Mulyawan,SE
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.</li><li>2.Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.</li><li>3.Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank</li><li>4.Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.</li><li>5.Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.</li><li>6.Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan, kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian</li><li>7.Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li><li>8.Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.</li></ol>	
2.	Nama	Edy widodo, SE
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.</li><li>2.Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.</li><li>3.Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank</li><li>4.Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan auditor eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.</li><li>5.Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.</li><li>6.Direksi wajib mengungkapkan kepada karyawan, kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian</li><li>7.Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</li><li>8.Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.</li></ol>	

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Natasha
- d. Monitor secara ketat Debitur yang bermasalah .
- e. Temuan pemeriksaan OJK masih dalam proses sebelum bulan Agustus 2024.
- f. Semua temuan Audit Internal harus telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Drs. H. Suhartono, M.M</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan</li> <li>2. Agenda rapat sebagaimana dimaksud apa ayat (1) antara lain mengenai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana bisnis BPR</li> <li>b. Isu-isu strategis BPR</li> <li>c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau</li> <li>d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR</li> </ol> </li> <li>3. Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.</li> <li>4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.</li> <li>5. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai anantara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR</li> <li>6. Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</li> <li>7. Dewan Komisaris tidak bertanggungjawab atas kerugian bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya</li> <li>b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank</li> <li>c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian</li> <li>d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut</li> </ol> </li> <li>8. Dewan Komisaris menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.</li> <li>9. Dewan Komisaris wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank.</li> <li>10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris</li> </ol>	

2.

Nama

H. Asroh Handoko, S.E. M.Si

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

1. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
2. Agenda rapat sebagaimana dimaksud apa ayat (1) antara lain mengenai:
  - a. Rencana bisnis BPR
  - b. Isu-isu strategis BPR
  - c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau
  - d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3. Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.
5. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai anantara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR
6. Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
7. Dewan Komisaris tidak bertanggungjawab atas kerugian bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan bank
  - c. Tidak mepuyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut
8. Dewan Komisaris menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
9. Dewan Komisaris wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank.
10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward/ apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Natasha.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang bermasalah
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti pada paling lambat bulan Agustus 2024.
- f. Menindaklanjuti semua temua Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat

signifikan.

g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis

#### 4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

#### 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

nihil

#### 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Bagus Setya Mulyawan,SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Edy widodo, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Drs. H. Suhartono, M.M
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	H. Asroh Handoko, S.E. M.Si
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Nihil

#### 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Bagus Setya Mulyawan,SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham

	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Edy widodo, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Drs. H. Suhartono, M.M
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	H. Asroh Handoko, S.E. M.Si
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Drs. H. Suhartono, M.M
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Gamping Artha Raya
	Persentase Kepemilikan (%)	95,00

2.	Nama	Drs. H. Suhartono, M.M
	Nama Bank/Perusahaan Lain	PT Inti Cipta Permata
	Persentase Kepemilikan (%)	50,00

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR dan perusahaan lain.

Drs. H. Suhartono, M.M memiliki saham di BPR Gamping Artha Raya dan PT Inti Cipta Permata

## 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Bagus Setya Mulyawan,SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Edy widodo, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Drs. H. Suhartono, M.M
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada

	Pemegang Saham Lain di BPR	
2.	Nama	H. Asroh Handoko, S.E. M.Si
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.  
nihil

### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Bagus Setya Mulyawan,SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Edy widodo, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Drs. H. Suhartono, M.M
----	------	------------------------

	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	H. Asroh Handoko, S.E. M.Si
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada  
Nihil

### 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

#### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp984.654.240
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp432.766.620

#### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp184.855.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp340.536.234
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp103.998.181

### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

**2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

**2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp39.600.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

**2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp20.552.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

**2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun**

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	<b>0 orang</b>
--	----------------

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Nihil

## 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	5,70 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,00 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	3,00 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	50,00 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	5,70 : 1

nihil

## 13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	19 Mei 2024
	Jumlah Peserta	7 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Exit meeting dengan OJK		

2.	Tanggal Rapat	16 Juli 2024
	Jumlah Peserta	5 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Rapat Evaluasi Semester I tahun 2024		
3.	Tanggal Rapat	14 Agustus 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> rapat dengan Direksi dan PE		
4.	Tanggal Rapat	10 September 2024
	Jumlah Peserta	40 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Rapat dengan Direksi		
5.	Tanggal Rapat	17 Oktober 2024
	Jumlah Peserta	4 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Rapat Evaluasi Triwulan 3 tahun 2024		
6.	Tanggal Rapat	03 Desember 2024
	Jumlah Peserta	10 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b> Rapat evaluasi RBB 2025		

tidak ada

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Drs. H. Suhartono, M.M
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	H. Asroh Handoko, S.E. M.Si
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	6 kali hadir

Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
--------------------------------------	--------------

telah bertemu

## 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	1 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	1 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	1 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	1 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>1 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>1 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Penyelesaian fraud akan diselesaikan maksimal pada tahun 2025

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>

  

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>3 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>

1. Debitur atas nama Johanes permasalahan hukum perdata dalam penyelesaian dan telah selesai dengan penjualan agunan
2. Debitur atas nama R. Kelik Sumaryoto permasalahan hukum dalam penyelesaian dan telah selesai dengan penjualan agunan
3. Debitur atas nama Eni Kartini permasalahan hukum dalam penyelesaian dan telah diselesaikan dengan Proses AYDA lelang, sekarang agunan dalam proses penjualan

## 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Adanya benturan kepentingan di transaksi Deposito yaitu berdasarkan SK Direksi No 013/SK/ Dir/ BPR- NBA/ VI/23 tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan Suku Bunga Deposito menyebutkan jangka waktu 3 bulan suku bunga 4,25% p.a dan 6 bulan suku bunga 4,5% p.a. Pada posisi Desember 2024 terdapat pemberian bunga simpanan berupa deposito kepada pihak terkait melebihi counter rate antara lain sebagai berikut :

1. Bagus Setyawan Mulyawan jangka waktu 3 bulan suku bunga 6% ,
2. Dr Fredi Setyawan Jangka waktu 3 bulan suku bunga 6%,
3. Drg Tantri Onny Bianti jangka waktu 3 bulan suku bunga 6%,
4. PT Abirupa Nusa Cipta jangka waktu 3 bulan suku bunga 5,75%,
5. Stefanus Beni Hartanto SE suku bunga 6%

## 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	06 Mei 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Adat Budaya Klitren
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan adat budaya kelurahan Klitern Yogyakarta
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	28 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perbarindo DIY
	Penjelasan Kegiatan	Donasi Paket Sembako HUT Perbarindo
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	28 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	FKIJK
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan Air Bersih untuk masyarakat Gunung Kidul Yogyakarta
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	11 November 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Hari Kesetiawanan Sosial
	Penjelasan Kegiatan	Dana untuk Memperingati Hari Kesetiawanan Sosial
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	08 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan Wreda Hanna

	Penjelasan Kegiatan	Pemberian Donasi dalam rangka HUT BPR Natasha
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	08 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panti Asuhan di Sleman
	Penjelasan Kegiatan	Pemberian Donasi dalam rangka HUT BPR Natasha ke 10
	Jumlah (Rp)	Rp2.350.000

Semua kegiatan telah terlaksana

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 April 2025

**PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH**



**Drs. H. Suhartono, MM**  
Komisaris Utama

  
**BankNatasha**  
PT. BPR Natasha Bintang Anugrah



**Bagus Setya Mulyawan**  
Direktur Utama

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

Nama BPR : PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH  
Alamat : Jl. Urip sumoharjo no. 65 yogyakarta  
Nomor Telepon : 0274-888802  
Posisi Laporan : Tahun 2024  
Modal Inti : Rp34.508.248.816  
Total Aset : Rp293.970.326.372

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 3 (Cukup Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 3 (Cukup Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>3</b>
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Cukup Baik</b>

**Kesimpulan**

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

**Faktor Positif****A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur**

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
2. Struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan yang terpenuhi secara keseluruhan.
4. Kondisi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.
5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang terpenuhi secara keseluruhan.
8. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini terpenuhi secara keseluruhan.
10. Implementasi struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.

**B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola**

1. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham berjalan dengan memadai.
2. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dinilai cukup memadai.
3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris BPR tergolong cukup memadai.
4. Implementasi proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan di BPR menunjukkan kondisi memadai.
5. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan berjalan dengan memadai.
6. Manajemen BPR telah menilai bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern berjalan dengan memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong cukup memadai.
9. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR berada dalam kondisi memadai.

10. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
11. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang memadai.

**C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola**

1. Implementasi hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham di BPR menunjukkan kondisi memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai cukup memadai.
3. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian memadai.
4. Kondisi hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang dimiliki BPR adalah memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. Kondisi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR adalah memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong memadai.
9. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit berjalan dengan memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Ditinjau dari sisi regulasi, hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR dinilai memadai.

**Faktor Negatif****A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur**

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang masih terpenuhi sebagian.
2. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, antara lain (1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, (2) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, (3) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai masih terpenuhi sebagian sebagian.

**B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola**

Nihil

**C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola**

Nihil

Yogyakarta, 10 Januari 2025

PT. BPR NATASHA BINTANG ANUGRAH

Disetujui



Drs. Suhartono, MM  
Komisaris Utama



**BankNatasha**  
PT. BPR Natasha Bintang Anugrah



Edy Widodo, SE  
Direktur